

**PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA *MIDDLE POWER* DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA – UKRAINA TAHUN 2022-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

GALIH SETYAWAN

20323082

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA *MIDDLE POWER* DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA – UKRAINA TAHUN 2022-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

GALIH SETYAWAN

20323082

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA *MIDDLE POWER* DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA – UKRAINA TAHUN 2022-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana

S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

29 Januari 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 5 Januari 2026,



Handwritten signature of Galih Setyawan.

Galih Setyawan

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB 2 KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2022-2023 DAN DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA	19
2.1 Hubungan Diplomatik Rusia dan Ukraina.....	19
2.2 Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014.....	20
2.3 Eskalasi Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022-2023	21
2.4 Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia	21
2.5 Indonesia sebagai Negara <i>Middle Power</i>	27
BAB 3 PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA <i>MIDDLE POWER</i> DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022-2023	29
3.1 Respon Negara-Negara Besar dan Lembaga Internasional.....	29

3.2	Indonesia sebagai Negara <i>Middle Power</i> dan Implementasinya dalam Konflik Rusia-Ukraina	33
3.2.1	<i>Peran Indonesia sebagai Katalisator (Catalyst) melalui Kunjungan ke Rusia dan Ukraina</i>	34
3.2.2	<i>Peran Indonesia sebagai Fasilitator (Facilitator) dalam Mendorong Dialog untuk Misi Kemanusiaan</i>	39
3.2.3	<i>Peran Indonesia sebagai Pengelola (Manager) dalam Menjaga Stabilitas Global</i>	41
3.2.4	<i>Hasil Akhir dari Upaya Middle Power Indonesia</i>	43
3.3	<i>Timeline Peranan Indonesia sebagai Middle Power</i>	46
BAB 4	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Rekomendasi.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Inflasi Indonesia (2021–2023)	23
Gambar 3. Surplus Neraca Perdagangan Non-Migas Indonesia (2021-2022).....	25

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang kembali memanas pada tahun 2022 telah menimbulkan dampak multidimensional bagi stabilitas global, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Situasi ini mendorong Indonesia, sebagai negara yang mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, untuk mengambil langkah diplomasi guna mendorong terciptanya perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya diplomasi Indonesia melalui pendekatan *middle power* dalam penyelesaian konflik Rusia–Ukraina pada periode 2022–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal akademik, laporan resmi pemerintah, pemberitaan, serta literatur diplomasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow, berupaya memfasilitasi komunikasi, mendorong dialog damai, serta mengatasi persoalan kemanusiaan dan krisis pangan global. Namun implementasi *middle power* Indonesia menghadapi sejumlah keterbatasan, seperti kompleksitas geopolitik, absennya kesiapan politik dari pihak yang bertikai, serta tekanan internasional terhadap posisi netral Indonesia.

Kata Kunci: *Middle Power*, Indonesia, Konflik Rusia–Ukraina, Diplomasi Bebas Aktif, Politik Internasional.

ABSTRACT

The armed conflict between Russia and Ukraine, which sharply escalated in 2022, has generated multidimensional impacts on global stability, including significant consequences for Indonesia's economy and supply chains. This situation prompted Indonesia, guided by its independent and active foreign policy, to play a mediating role in promoting peaceful resolution efforts. This study analyzes Indonesia's diplomatic efforts through the middle power approach in addressing the Russia–Ukraine conflict during 2022–2023. Using a qualitative descriptive method, this research draws on secondary data from academic journals, official government publications, news reports, and international diplomacy literature. The findings reveal that Indonesia, particularly through President Joko Widodo's visits to Kyiv and Moscow, sought to facilitate communication between the conflicting parties, encourage peaceful dialogue, and respond to the humanitarian and global food security crisis triggered by the war. However, Indonesia's implementation of middle power faced several limitations, including the complexity of great-power politics, the lack of political readiness from both parties to negotiate, and international scrutiny regarding Indonesia's neutral position.

Keywords: *Middle Power, Indonesia, Russia–Ukraine Conflict, Independent and Active Foreign Policy, International Politics.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik bersenjata yang melibatkan dua negara yakni Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2014, Pada periode tersebut Ukraina mengalami krisis politik domestik yang ditandai dengan demonstrasi massal dan tekanan publik terhadap pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich, yang kemudian berujung pada pemberhentian dirinya dari jabatan Presiden melalui keputusan parlemen Ukraina. Pada saat itu, semua rakyat Ukraina melakukan demonstrasi untuk pro-Uni Eropa yang disebabkan karena presiden Yanukovich memiliki keputusan untuk melakukan kerjasama dalam perdagangan dengan Rusia. Ketika adanya usaha penurunan jabatan terhadap Presiden Yanukovich, masyarakat negara Ukraina terbagi menjadi dua bagian, yakni sebagian ada masyarakat yang mendukung Uni-Eropa dan sebagian lainnya mendukung Rusia. Bagian masyarakat yang mendukung Rusia merupakan masyarakat dan juga para politisi Crimea (Syuryansyah & Berthanila, 2022). Konflik yang terjadi antara kedua negara ini tentunya tidak berhenti dan selesai begitu saja, setelah terjadinya krisis di Crimea, Rusia melakukan dukungan kepada kelompok separatis di Donetsk dan juga Luhansk, dimana kedua daerah tersebut merupakan daerah yang memang ingin memisahkan diri dari bagian Ukraina. Kemudian pada tahun 2019, setelah dilantiknya Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Ukraina, ia mengambil sebuah kebijakan yang dapat dikatakan merupakan suatu sebagai kebijakan yang pro terhadap Eropa. Eropa sendiri memiliki prinsip yang bertentangan dengan

Rusia. Dan pada akhirnya pada Februari 2022, NATO telah mengupayakan untuk melakukan ekspansi aliansinya ke daerah Eropa Timur dengan kata lain, NATO menjadikan Ukraina sebagai targetnya untuk dijadikan bagian dari anggota NATO sendiri, dan pada akhirnya hal yang dilakukan oleh NATO ini telah dianggap oleh Rusia sebagai pelanggaran dan pada akhirnya Putin selaku Presiden Rusia melancarkan serangan militernya ke Ukraina (Syuryansyah & Berthanila, 2022).

Invasi ke Ukraina dilakukan oleh Rusia ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden Ukraina, Zelensky, pada saat itu lebih mengarah ke Eropa, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rusia. Dalam skala global, konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak yang mempengaruhi banyak aspek, salah satunya adalah bagi negara Indonesia sendiri, akibat konflik yang terjadi tersebut akhirnya melahirkan pro dan kontra untuk kehadiran presiden Rusia nantinya dalam pelaksanaan G20 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia. Adanya pro dan kontra ini menjadi penentuan bagi Indonesia dalam menentukan sikap serta posisi politik luar negerinya dan juga perannya dalam presidensi G20 yang diselenggarakan pada November 2022.

Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara yang terlibat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi luas bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Dampak tersebut dirasakan baik secara material, seperti terganggunya stabilitas ekonomi global, kenaikan harga komoditas, serta ketidakpastian keamanan internasional, maupun secara nonmaterial, seperti meningkatnya ketegangan politik dan krisis kemanusiaan. Oleh sebab itu, Indonesia turut

berpartisipasi secara aktif dalam merespons konflik Rusia–Ukraina melalui berbagai langkah diplomatik yang mencerminkan perannya sebagai negara *middle power* (Junaedi, 2022). Indikasi dari peran tersebut terlihat melalui keterlibatan langsung Indonesia dalam membangun komunikasi dengan kedua pihak yang berkonflik, pemanfaatan forum multilateral seperti KTT G20 untuk menjaga stabilitas global, serta upaya menempatkan diri sebagai jembatan dialog yang tidak berpihak pada salah satu kubu. Posisi ini sejalan dengan karakteristik *middle power* yang berfokus pada diplomasi, multilateralisme, serta konflik manajemen di arena global untuk memperkuat stabilitas internasional. Dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjalankan diplomasi yang bersifat tidak memaksakan dan berorientasi pada pengelolaan konflik, pendekatan ini juga dilakukan tanpa adanya penggunaan kekuatan militer atau tekanan politik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana upaya diplomasi Indonesia sebagai negara *middle power* dalam merespons konflik Rusia–Ukraina, guna memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dalam sistem internasional serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut (Andrew F. Cooper 1993).

Dampak yang terjadi terhadap Indonesia akibat konflik ini menyebabkan Indonesia mengalami kerugian dalam sektor ekonomi seperti kenaikan harga komoditas seperti energi dan pangan. Rusia merupakan salah satu negara yang mengekspor minyak dan gas di dunia, sementara Ukraina merupakan negara yang telah dianggap menjadi lumbung gandum di eropa. Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada impor terhadap minyak dan gas menjadikan konflik

ini sebagai tekanan yang besar pada perekonomian Indonesia, dikarenakan kenaikan yang cukup signifikan terhadap harga minyak dan gas dan hal ini menyebabkan meningkatnya harga bahan bakar dan akhirnya hal ini memicu inflasi yang berdampak pada biaya hidup Masyarakat secara keseluruhan (Station, 2022)

Indonesia harus mencari pemasok gandum lain selain Ukraina, Hal tersebut dikarenakan Ukraina merupakan negara yang menjadi salah satu pemasok gandum utama untuk Indonesia, produk yang didatangkan dari Ukraina ke Indonesia pada tahun 2021 silam adalah sereal sendiri yang mencakup gandum dan memiliki nilai US\$ 946,5 juta. Khususnya untuk sereal, Indonesia menjadikan Ukraina pemasok terbesar, dimana sereal yang diimpor dari Ukraina ke Indonesia mencapai 23,23% dari total nilai impor komoditas tersebut (Maesaroh, 2022). Selain mengimpor gandum, Indonesia juga mengalami masalah dalam suplai pasokan bahan baku pupuk, yang nyatanya masih belum lancar dalam melakukan impor dari Rusia dan Ukraina, namun akhirnya diperburuk akibat konflik yang terjadi. oleh karena itu akhirnya Indonesia mencari sumber lain untuk melakukan impor pupuk (Lazuardi, 2023). Ketahanan pangan juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi akibat konflik ini, seperti yang telah disebutkan, sebagian besar suplai untuk melakukan produksi pupuk negara Indonesia berasal dari Rusia dan Ukraina, terutama Rusia, I Gede Ngurah mengatakan jika pupuk merupakan tiga poin utama dalam komoditas yang diimpor ke Indonesia di luar besi, baja, serta bahan bakar mineral. Impor pupuk sebenarnya masih dapat dilakukan dari Rusia di tengah konflik ini, namun yang menjadi poin utama dari kendala pelaksanaan impor yakni adalah diblokirnya jalur logistik yang menjadi jalur utama dalam melakukan impor dari Rusia ke

Indonesia (Maesaroh, 2022). Rusia dan ukraina merupakan dua negara yang memiliki peran cukup besar dalam rantai pasokan dunia, Rusia dan Ukraina sendiri merupakan negara sebagai pemasok bahan bakar fosil dan nonfosil (Fadel, 2022).

Banyak krisis yang masih berlanjut hingga sekarang dan juga belum ditemukan titik terang dari permasalahan ini. Oleh sebab itu Indonesia turut ikut serta dalam berpartisipasi untuk mendamaikan konflik dari dua negara tersebut. Indonesia merasa bahwa konflik yang terjadi saat ini dianggap merugikan seluruh pihak yang ada dunia termasuk Indonesia secara material seperti ekonomi, sosial, keamanan dan juga kerugian secara non material seperti politik dan kemanusiaan. Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, yang memberikan gambaran bagaimana posisi Indonesia di dunia Internasional. Dengan mengedepankan prinsip kebijakan luar negerinya yang bebas aktif dengan melakukan diplomasi untuk menunjukkan komitmennya dalam menciptakan perdamaian dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai apa saja tantangan dan juga peluang yang dihadapi Indonesia dalam penyelesaian konflik ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang penulisan proposal ini, rumusan masalah pada pembahasan yang di teliti oleh penulis adalah “Bagaimana peran Indonesia sebagai negara *middle power* dalam penyelesaian konflik Rusia–Ukraina pada periode 2022–2023?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Indonesia sebagai negara *middle power* dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina pada periode 2022-2023.
2. Bagaimana implementasi peran Indonesia sebagai negara *middle power* dalam merespons konflik Rusia–Ukraina.
3. Bagaimana dampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia pada periode 2022-2023.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian memiliki fokus untuk mengetahui proses diplomasi Indonesia dalam melakukan penyelesaian terhadap konflik Rusia dan Ukraina, Penulis menetapkan batasan pembahasan penelitian serta mengambil rentang waktu terbatas yaitu dari tahun 2022 hingga 2023. Hal itu ditandai dengan adanya upaya Indonesia dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina mulai dilakukan pada awal tahun 2022 dan upaya tersebut mulai berkurang di tahun 2023. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia mulai berkurang di tahun 2023 karena adanya beberapa faktor yang menjadikan Indonesia tidak lagi mementingkan upaya diplomasinya di tahun tersebut. Faktor-Faktor tersebut antara lain yaitu, pada tahun 2022 upaya oleh Indonesia dimulai karena adanya ketidakjelasan posisi Indonesia di forum multilateral, adanya kepentingan diplomatik dan ekonomi, fokus dengan isu lain seperti isu yang berada di daerah domestik serta tantangan global dan pemulihan ekonomi negara pasca pandemi covid-19, dan adanya respon yang beragam

terhadap proposal Indonesia untuk solusi konflik yang terjadi. Oleh karena itu upaya tersebut menurun di tahun 2023 dan hanya banyak dilakukan di tahun 2022.

Oleh karena itu, dengan menyeluruh Indonesia mengambil keputusan untuk menghentikan upaya mediasinya dalam penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2023 yang hal tersebut merupakan hasil keputusan dari ketidakjelasan posisi diplomatik Indonesia dan kepentingan ekonomi negara. Ini menjadikan cerminan bagi Indonesia sendiri dalam realitasnya untuk menyeimbangkan prinsip kedaulatan dan kebutuhan pragmatis agar tetap dapat menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang besar demi kebijakan luar negeri Indonesia sendiri.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai konflik bersenjata yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina. Penelitian berupa jurnal yang sudah pernah ada dijadikan tumpuan dalam melakukan penelitian mengenai topik yang diambil. Berikut dibawah ini merupakan penelitian-penelitian yang membahas tentang konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Tiara & Mas'udi (2023) yang berjudul "*Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power*". Dalam penelitian ini dibahas bagaimana upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara negara Rusia dan Ukraina melalui pedoman UUD 1945. Didalamnya dituliskan bahwa Indonesia harus ikut turut serta dalam melakukan misi perdamaian untuk mencapai perdamaian dunia. Dikarenakan

konflik yang terjadi jika dibiarkan akan berdampak pada sektor pangan dan energi global. Penelitian ini membahas terlalu luas karena ikut mencakup dampaknya pada sektor global dan tidak hanya berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan dipersempit pada upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik kedua negara tersebut.

Penelitian kedua yang pernah dilakukan membahas bagaimana upaya negara Indonesia dalam membantu kedua negara yang sedang mengalami konflik untuk mencapai perdamaian. Dalam penelitian yang sudah pernah diteliti oleh Saryono et al. (2022) yang berjudul “*Sikap Politik dan Hukum Internasional Indonesia terkait Penyerangan Rusia ke Ukraina*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana sikap Indonesia dalam menanggapi adanya konflik antar kedua negara yakni Rusia dan Ukraina, yang pada dasarnya Indonesia menganut politik bebas aktif dan tergabung dengan gerakan non-blok. Dijelaskan juga dalam penelitian tersebut Indonesia meneguhkan pendiriannya sebagai negara yang memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan bersikap netral dan berusaha untuk mengundang Rusia dan Ukraina pada konferensi G20 lalu yang diadakan di Bali. Dijelaskan juga dalam penelitian tersebut sudah dijelaskan jika Indonesia berperan dalam menanggapi konflik kedua negara tersebut. Namun penelitian yang diteliti tersebut terbilang terlalu luas cakupannya karena ikut serta membahas Hukum Internasional Indonesia mengenai konflik yang sedang terjadi ini. Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti, nantinya akan melengkapi pembahasan dari jurnal ini tentang bagaimana usaha dan sikap Indonesia dengan politik bebas aktifnya dalam

membantu menciptakan perdamaian antar kedua negara tersebut.

Kemudian pada penelitian ketiga yang diteliti oleh Hutabarat (2022) berjudul “*Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia- Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest*” berisi mengenai bagaimana posisi Indonesia dalam menyikapi konflik antara Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung dengan menerapkan konsep berpolitik luar negerinya yaitu bebas aktif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam penelitian ini disebutkan dilakukan karena dampak negatif atas terjadinya konflik ini menjadi semakin terasa dan Indonesia sebagai negara yang turut menjunjung perdamaian dunia ikut melakukan penyelesaian dengan melakukan diplomasi terhadap kedua negara tersebut. Penelitian ini telah menyebutkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi namun belum terkonsentrasi pada rentang waktu tertentu. Oleh karena itu peneliti pada penelitian ini akan berfokus pada rentang tahun 2022-2023 untuk mempersempit penelitian dan tidak membahas terlalu luas.

Penelitian keempat adalah penelitian yang diteliti oleh Syuryansyah & Berthanila (2022) yang memiliki judul “*Upaya Penyelesaian Konflik Rusia Ukraina*”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai apa yang menjadi penyebab Rusia dan Ukraina melakukan peperangan serta juga membahas upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi ini. Mengingat peperangan ini terjadi karena adanya perebutan sebuah wilayah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dimana dalam penelitian ini juga dibahas beberapa opsi yang mungkin akan diterapkan kepada kedua negara yang sedang berperang tersebut untuk

mencapai perdamaian. Diantara lain opsi yang dituliskan adalah negosiasi, *good offices*, melalui organisasi internasional, serta mediasi. Penelitian yang telah diteliti tersebut dijelaskan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk membantu kedua negara untuk mencapai perdamaian, namun penelitian ini terlalu luas karena membahas upaya yang dilakukan hingga ke ranah organisasi internasional. Sehingga pada penelitian yang akan ditulis, penulis akan mempersempit penelitian ini kearah upaya negara Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Lalu pada penelitian kelima yang memiliki judul “*Konflik Rusia-Ukraina dan Peran Pemerintah Indonesia*” yang ditulis oleh Midhol (2022). Dalam penelitian ini penulis penelitian tersebut membahas peranan pemerintah Indonesia dan hubungannya dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam penelitian ini dijelaskan juga bahwa Indonesia telah memberikan pernyataan mengenai pengambilan keputusannya untuk melakukan diplomasi terhadap Rusia dan Ukraina. Namun sangat disayangkan pembahasan dalam penelitian ini belum terlalu lengkap karena masih banyak bagian yang belum terjelaskan. Sehingga pada penelitian yang akan ditulis oleh peneliti akan menjelaskan lebih rinci apa yang akan dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik ini.

Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, kebanyakan belum membahas secara rinci bagaimana upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian kedua negara yang sedang mengalami konflik dan apa saja usaha-usaha yang dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai apa saja upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik

Rusia dan Ukraina yang memiliki dampak terhadap perekonomian serta politik dunia global pada tahun 2022-2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *Middle Power* oleh Andrew F. Cooper, Richard A. Higgot, dan Kim Richard Nossal

Penelitian ini akan menggunakan teori *Middle Power* yang dikemukakan oleh Andrew F. Cooper, Richard A. Higgot, dan Kim Richard Nossal. Teori ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana posisi serta kepentingan pemerintah Indonesia dalam upaya Diplomasi yang dilakukan terhadap konflik antara Rusia dan Ukraina. Teori *Middle Power* sendiri memberikan pandangan bahwa negara yang tidak masuk kedalam kategori negara adidaya masih tetap memiliki kapasitas untuk memainkan peran aktif dalam sistem internasional, khususnya melalui diplomasi, multilateralisme, dan juga kepemimpinan non-hegemonik. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa Indonesia yang merupakan negara *middle power* tetap dapat berkontribusi untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong perdamaian internasional (Andrew F. Cooper 1993).

Dalam teori *middle power* yang dikemukakan oleh Cooper, Higgott, dan Nossal, peran negara *middle power* tidak dipahami sebagai kekuatan yang mampu menentukan hasil akhir dalam sistem internasional, melainkan sebagai aktor yang berkontribusi melalui fungsi-fungsi tertentu dalam proses pengelolaan hubungan

internasional. Salah satu peran utama yang dijalankan oleh negara *middle power* adalah sebagai *catalyst*. Peran katalisator merujuk pada kemampuan negara *middle power* untuk memprakarsai isu, mendorong terbukanya dialog, serta memicu perhatian dan respons internasional terhadap suatu permasalahan global. Dalam peran ini, *middle power* berfungsi sebagai pemicu awal (*agenda setter*) yang membuka ruang interaksi di antara aktor-aktor internasional, khususnya ketika negara-negara besar enggan atau belum siap untuk terlibat secara langsung. Peran *catalyst* menekankan inisiatif diplomatik dan kepemimpinan normatif, bukan dominasi kekuatan material (Andrew F. Cooper 1993).

Selain sebagai katalisator, negara *middle power* juga menjalankan peran sebagai *facilitator*. Peran fasilitator berkaitan dengan kemampuan *middle power* untuk menjembatani kepentingan pihak-pihak yang berbeda dan membantu proses komunikasi di antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik atau perbedaan kepentingan. Dalam konteks ini, *middle power* bertindak sebagai penghubung yang relatif netral dan dapat diterima oleh berbagai pihak karena tidak memiliki kepentingan hegemonik. Sebagai fasilitator, negara *middle power* membantu menciptakan suasana kondusif bagi dialog, membangun kepercayaan secara bertahap, serta mengurangi ketegangan politik yang dapat menghambat proses diplomasi. Peran ini menempatkan *middle power* sebagai aktor yang berorientasi pada proses, bukan hasil akhir dari suatu perundingan (Andrew F. Cooper 1993).

Peran ketiga yang melekat pada negara *middle power* menurut Cooper dkk. adalah sebagai *manager*. Peran pengelola ini merujuk pada keterlibatan *middle*

power dalam menjaga keberlangsungan tata kelola internasional dan stabilitas sistem global. Sebagai *manager*, *middle power* berkontribusi dalam mengelola konflik, mengawasi pelaksanaan kesepakatan internasional, serta memperkuat institusi dan mekanisme multilateral yang ada. Peran ini tidak bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara sepihak, melainkan untuk memastikan bahwa proses diplomatik dan kerja sama internasional dapat terus berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, *middle power* berfungsi sebagai penjaga keteraturan (*system maintenance*) dalam sistem internasional yang dinamis (Andrew F. Cooper 1993).

Ketiga peran tersebut yaitu *catalyst*, *facilitator*, dan *manager*, menunjukkan bahwa teori *middle power* lebih menekankan pada kontribusi negara menengah dalam pengelolaan proses dan stabilitas internasional daripada pada kemampuan untuk memaksakan kehendak. Melalui peran-peran tersebut, negara *middle power* menjalankan kepemimpinan internasional yang berbasis legitimasi, diplomasi, dan multilateralisme. Kerangka ini menjadi penting dalam penelitian hubungan internasional karena memungkinkan analisis yang lebih realistis terhadap peran negara non-adidaya, termasuk Indonesia, dalam merespons konflik internasional berskala besar (Andrew F. Cooper 1993).

Dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina, teori *middle power* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana langkah diplomasi Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan aktif terhadap kedua negara yang terlibat konflik. Indonesia tidak memosisikan diri sebagai pihak yang mengarahkan jalannya

penyelesaian konflik, namun memposisikan dirinya sebagai negara yang berupaya menjaga komunikasi, mendorong dialog, dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia merupakan bentuk konkret dari praktik diplomasi *middle power*, dimana Indonesia berupaya menjalankan peran kepemimpinan internasional yang bersifat terbatas namun signifikan (Andrew F. Cooper 1993).

Dengan menggunakan teori *middle power*, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina. Teori ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada tindakan diplomasi yang dilakukan, tetapi juga pada posisi struktural Indonesia dalam sistem internasional serta keterbatasan yang dihadapinya sebagai negara non-adidaya. Oleh karena itu, teori *middle power* dinilai relevan untuk menjelaskan kepentingan dan strategi diplomasi Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas internasional di tengah konflik Rusia dan Ukraina.

1.7 Argumen Sementara

Indonesia menjalankan peran sebagai *middle power* dalam penyelesaian konflik Rusia–Ukraina pada periode 2022–2023 melalui kepemimpinan internasional yang bersifat non-hegemonik. Dalam konteks ini, Indonesia mengimplementasikan peran sebagai katalisator atau (*catalyst*) dengan memulai keterlibatan diplomatik dan membuka kembali ruang komunikasi di tengah konflik, yang tercermin dari diplomasi tingkat tinggi dan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina. Selain itu, Indonesia juga menjalankan peran sebagai *facilitator* dengan mendorong dialog, membangun kepercayaan, serta menjadi jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik tanpa menggunakan tekanan militer maupun politik, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di sisi lain, Indonesia juga menjalankan peran sebagai *manager* melalui pengelolaan dampak konflik terhadap stabilitas global, khususnya dalam isu ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi internasional. Pemanfaatan forum multilateral seperti KTT G20 menunjukkan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab internasional, sekaligus menjaga agar konflik tidak meluas dan mengganggu tata kelola global. Namun, penelitian ini juga berpendapat bahwa peran Indonesia sebagai *middle power* menghadapi keterbatasan struktural, terutama terkait persepsi internasional mengenai netralitas Indonesia di tengah dominasi negara-negara besar. Oleh karena

itu, teori *middle power* digunakan untuk menganalisis peran, strategi, serta tantangan yang memengaruhi posisi Indonesia dalam konflik Rusia–Ukraina.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan riset oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode tersebut dikarenakan data yang menjadi referensi berasal dari literatur dan penelitian yang sudah ada.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah diplomasi pemerintahan negara Indonesia. Dalam penelitian ini negara Indonesia ikut melakukan diplomasi untuk membantu negara Rusia dan Ukraina mencapai perdamaian. Objek dalam penelitian ini adalah konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan data-data sekunder, data-data sekunder tersebut berasal dari literatur yang sudah ada seperti jurnal, buku, berita, situs resmi pemerintah, dan juga laporan-laporan resmi.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penelitian ini berawal dari pengumpulan sumber dan data yang berasal dari internet, kemudian sumber dan data yang dikumpulkan

dianalisis dan diperiksa relevansinya dengan topik yang diambil oleh penulis serta dilakukan validasi untuk memastikan hubungannya dengan topik yang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada Bab 1 penulis akan membahas mengenai latar belakang konflik Rusia-Ukraina serta latar belakang mengenai alasan Indonesia melakukan diplomasi terhadap kedua negara tersebut untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi.

BAB 2: KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2022-2023 DAN DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai hubungan Rusia-Ukraina, awal mula konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, serta akan menjelaskan bagaimana dampak dari konflik tersebut terhadap Indonesia.

BAB 3: PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA *MIDDLE POWER* DALAM KONFLIK RUSIA–UKRAINA TAHUN 2022–2023

Bab 3 dalam penelitian ini akan berisi penjabaran dari penelitian yang dilakukan, dalam bab 3 ini penulis akan menjelaskan lebih rinci bagaimana konflik bersenjata antara Rusia kontra Ukraina dan dampaknya terhadap politik dan perekonomian global, serta akan menjelaskan bagaimana Upaya Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktifnya dalam penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina menggunakan teori *Middle Power* oleh Andrew F. Cooper, Richard A. Higgot, dan

Kim Richard Nossal.

BAB 4 : PENUTUP

Pada bab 4 akan dituliskan mengenai kesimpulan dan juga saran, pada bab ini juga akan dilakukan penegasan mengenai permasalahan yang terjadi dan juga analisa dari permasalahan yang diteliti. Pada bab ini juga akan dituliskan saran terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Indonesia dan juga saran atas peperangan yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina.

BAB 2

KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2022-2023 DAN DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas secara mengenai dinamika konflik Rusia–Ukraina serta dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian Indonesia. Dimana konflik ini tidak hanya bersifat regional, namun juga sudah menjadi isu global yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas geopolitik, dan juga perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, guncangan terhadap pasar global semakin berdampak, terutama pada sektor energi, pangan, serta pupuk. Indonesia yang merupakan negara yang sangat bergantung pada impor gandum, minyak, gas, serta bahan baku pupuk ikut menjadi negara yang berdampak langsung, mulai dari naiknya harga global dan juga terganggunya rantai distribusi internasional. Situasi ini berdampak pada inflasi nasional, tekanan fiskal, ketahanan pangan, hingga kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

2.1 Hubungan Diplomatik Rusia dan Ukraina

Hubungan Rusia–Ukraina terbentuk setelah Ukraina merdeka pada 1991 usai lebih dari tujuh dekade berada di bawah pemerintahan totaliter Uni Soviet. Sebelum kemerdekaan, Ukraina mengalami berbagai tragedi, seperti revolusi Bolshevik, kelaparan besar 1930-an, pendudukan Nazi, pembantaian kaum Yahudi, serta pembersihan politik dan stagnasi. Dalam Uni Soviet yang didominasi Rusia, Ukraina diperlakukan sebagai wilayah jajahan; budaya dan bahasanya

dimarginalkan, sementara elit politiknya dimanfaatkan untuk kepentingan Moskow. Eksploitasi sumber daya dan populasi Ukraina meninggalkan trauma sejarah, sehingga kemerdekaan diraih tanpa tradisi perayaan yang kuat.

2.2 Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014

Rusia secara paksa menganeksasi Krimea pada Maret 2014 dan memperluas konflik ke Ukraina Timur, tindakan yang dikutuk negara Barat sebagai pelanggaran hukum internasional. Aneksasi dilakukan oleh pasukan bersenjata Rusia tanpa tanda pengenal, sementara Ukraina kesulitan memberikan respons militer. Menjelang pemilu Mei 2014, Ukraina mulai merebut kembali wilayah sengketa, dan AS serta Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Latar belakang konflik ini terkait dinamika politik Ukraina, dukungan Krimea yang pro-Rusia terhadap Viktor Yanukovych, serta kepentingan militer Rusia di Sevastopol. Setelah Yanukovych melarikan diri pada 2014, pasukan pro-Rusia menguasai Krimea, diikuti referendum yang dianggap tidak konstitusional oleh Kyiv. Meski hasil referendum menyatakan dukungan besar untuk bergabung dengan Rusia dan Putin menandatangani integrasi Krimea, sebagian besar negara dan PBB tetap mengakui Krimea sebagai bagian dari Ukraina.

2.3 Eskalasi Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022-2023

Pada akhir 2021 hingga awal 2022, Rusia mengerahkan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina dan Belarus, memicu kekhawatiran invasi meski Putin menyebutnya sebagai latihan militer. Rusia menuntut pembatasan perluasan NATO, namun ditolak oleh Barat. Pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk serta mengirim pasukan ke Ukraina, yang dibalas dengan sanksi Barat. Invasi penuh dimulai pada 24 Februari 2022 dengan serangan ke berbagai kota Ukraina, diikuti deklarasi darurat militer oleh Presiden Zelensky dan kecaman global. Rusia menargetkan Kyiv dengan cepat, sempat merebut Bandara Hostomel dan wilayah Kherson, namun upaya tersebut gagal akibat perlawanan kuat Ukraina dan kendala logistik Rusia.

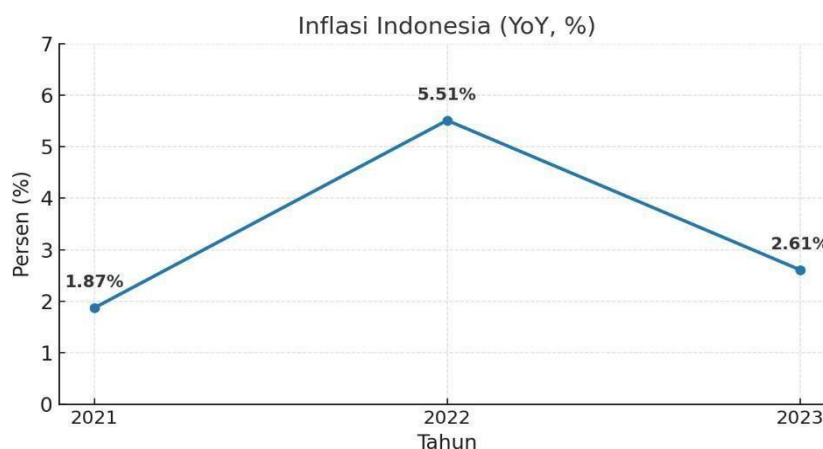
2.4 Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia

Konflik Rusia–Ukraina yang meletus pada Februari 2022 merupakan salah satu peristiwa geopolitik terbesar dalam sejarah kontemporer, yang efeknya tidak hanya terbatas pada kawasan Eropa Timur, melainkan menjalar hingga ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perang tersebut segera memicu guncangan besar terhadap rantai pasok global, terutama di sektor energi, pangan, dan pupuk, yang menjadi penopang utama stabilitas ekonomi. Dampak tersebut tidak dapat dihindari oleh Indonesia yang posisinya sangat terintegrasi dalam sistem perdagangan internasional. Akibatnya, sejumlah kanal ekonomi nasional seperti harga komoditas, inflasi, kinerja perdagangan, ketahanan pangan, sektor keuangan,

hingga respons kebijakan pemerintah ikut terdampak secara signifikan. Studi empiris yang dilakukan Junaedi (2022) menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi di Indonesia pascakonflik terlihat jelas melalui gejolak nilai tukar, meningkatnya tekanan fiskal, serta ketidakpastian ekonomi yang menekan daya beli masyarakat.

Salah satu aspek paling krusial yang dirasakan segera setelah konflik adalah kenaikan harga pangan. Indonesia, sebagai negara yang tidak memproduksi gandum secara domestik, sangat bergantung pada impor komoditas tersebut. Ketika pasokan dari dua negara eksportir utama yakni Rusia dan Ukraina terganggu, Indonesia harus menghadapi lonjakan harga global yang pada akhirnya menekan kondisi pasar domestik. Ben Hassen & El Bilali (2022) menegaskan bahwa gangguan pasokan dari Laut Hitam mendorong harga pangan dunia, khususnya gandum, minyak nabati, dan pupuk, ke titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan harga tersebut tidak hanya mengakibatkan kenaikan biaya hidup masyarakat, tetapi juga memperlemah ketahanan pangan di banyak negara importir, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya harga tepung terigu, mie instan, hingga berbagai produk olahan gandum yang sangat populer di pasar domestik. Inflasi pangan menjadi salah satu komponen utama dalam lonjakan inflasi nasional. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Jia et al. (2024) yang melaporkan bahwa perang telah menurunkan produksi pangan global dan mendorong kenaikan harga sereal hingga sekitar 20% hanya dalam tiga bulan pertama invasi.

Gambar 1. Inflasi Indonesia (2021–2023)



Sumber: Bank Indonesia (Target Inflasi, 2021–2023); BPS (Berita Resmi Statistik Inflasi Desember 2023)

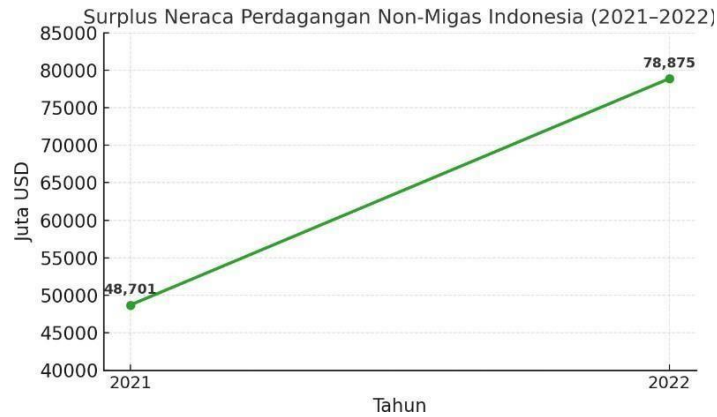
Bagi Indonesia, data BPS dan Bank Indonesia menunjukkan lonjakan inflasi yang signifikan: dari 1,87% pada tahun 2021 menjadi 5,51% pada 2022, sebelum berhasil ditekan kembali ke 2,61% pada 2023 (Gambar 1). Lonjakan tajam pada 2022 membuktikan betapa rentannya struktur inflasi Indonesia terhadap guncangan eksternal, khususnya yang terkait dengan pangan dan energi impor. Dalam konteks energi, biaya distribusi dan transportasi pun ikut terdorong naik seiring mahalannya harga minyak dunia, sehingga tekanan inflasi semakin terasa di hampir semua lapisan masyarakat.

Selain sektor pangan dan energi, dampak konflik juga sangat terlihat pada sektor keuangan Indonesia. Ketidakpastian geopolitik global dengan cepat menjalar ke pasar modal, menciptakan volatilitas harga saham serta perubahan perilaku investor. Sanoyo et al. (2024) melalui kajian literatur sistematis menemukan bahwa saham berbasis komoditas di Bursa Efek Indonesia sangat sensitif terhadap isu geopolitik global. Konflik Rusia–Ukraina terbukti meningkatkan volatilitas, risiko geopolitik, dan *abnormal returns* pada periode tertentu. Hasil tersebut diperkuat

oleh penelitian empiris yang dilakukan oleh Sari et al. (2023) dengan menggunakan metode *event study* pada sektor energi dan makanan-minuman di IDX. Penelitian tersebut menemukan adanya perbedaan signifikan dalam abnormal returns, cumulative abnormal returns, dan trading volume sebelum dan sesudah peristiwa kunci konflik, seperti invasi Rusia dan embargo energi Uni Eropa. Bukti ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global dan cenderung bereaksi secara cepat terhadap gejolak internasional.

Di sisi perdagangan, Indonesia menghadapi situasi yang paradoksal. Widoretno & Fitriyah (2024) mencatat bahwa konflik memperburuk ketidakpastian global dan memberikan tekanan terhadap arus perdagangan serta investasi. Bagi Indonesia, hal ini berarti penurunan daya saing sebagian sektor dan meningkatnya risiko bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Di ranah agrikultur, khususnya industri kelapa sawit, dampaknya bersifat ganda. Selain inflasi, konflik Rusia–Ukraina juga berdampak pada perdagangan internasional Indonesia. Meskipun volume ekspor meningkat, nilai ekspor justru menurun akibat tekanan harga global yang tidak stabil. Di satu sisi, kenaikan harga CPO (*crude palm oil*) memberikan keuntungan jangka pendek bagi produsen dan eksportir. Namun di sisi lain, fluktuasi harga yang tinggi dan intervensi kebijakan domestik seperti larangan ekspor sementara pada 2022 menimbulkan ketidakpastian jangka panjang dan menyulitkan perencanaan bisnis. Situasi ini mencerminkan dilema pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan stabilisasi harga domestik dengan upaya mempertahankan kinerja ekspor.

Gambar 2. Surplus Neraca Perdagangan Non-Migas Indonesia (2021-2022)



Sumber: Kementerian Perdagangan RI – *Satu Data Perdagangan* (diolah dari BPS), 2022

Gambar 3 memperlihatkan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia dalam dua tahun terakhir dengan menggunakan data resmi dari Kementerian Perdagangan (Satu Data, diolah dari BPS). Pada tahun 2021, surplus perdagangan non-migas tercatat sebesar USD 48,7 miliar, yang menandakan kondisi ekspor lebih tinggi dibandingkan impor pada sektor-sektor di luar migas. Angka ini kemudian melonjak drastis pada tahun 2022 menjadi USD 78,9 miliar, yang merupakan salah satu rekor tertinggi sepanjang sejarah neraca perdagangan non-migas Indonesia. Kenaikan signifikan tersebut terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas ekspor utama seperti batubara, minyak sawit (CPO), serta produk mineral lain yang terdampak langsung oleh perang Rusia–Ukraina. Konflik ini menyebabkan pasokan global terganggu, sehingga harga komoditas melonjak tajam dan memberikan keuntungan jangka pendek bagi negara pengekspor seperti Indonesia. Namun, fenomena ini juga mencerminkan tingginya ketergantungan neraca perdagangan

terhadap dinamika harga komoditas dunia, yang bersifat volatil dan tidak selalu berkelanjutan.

Aspek inflasi domestik semakin diperparah oleh gangguan rantai pasok global. Bukan hanya harga pangan dan energi, tetapi juga harga pupuk yang meningkat tajam, sehingga mempengaruhi biaya produksi sektor pertanian nasional. Laporan IMF dan Bank Dunia menunjukkan bahwa negara berkembang menanggung beban inflasi yang lebih berat, karena struktur pengeluaran rumah tangga mereka masih didominasi oleh pangan. Hal ini sejalan dengan kenyataan di Indonesia, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah paling merasakan dampak kenaikan harga. Tekanan inflasi semacam ini menuntut pemerintah untuk segera melakukan intervensi kebijakan guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Namun, tidak semua dampak dari konflik bersifat negatif. Pemerintah Indonesia juga mampu memanfaatkan momentum untuk memperkuat jalur diplomasi ekonomi dan melakukan diversifikasi pasokan. Upaya diplomatik seperti negosiasi perdagangan dengan Eurasian Economic Union (EAEU), serta langkah untuk memperdalam hubungan energi dengan Rusia, menjadi bagian dari strategi mitigasi dampak perang. Fithriya et al. (2022) dalam kajian politik ekonomi menekankan bahwa respons Indonesia terhadap konflik ini mencerminkan strategi pragmatis yang berorientasi pada stabilitas domestik dan keamanan pasokan. Di tingkat kebijakan makro, Handayani (2022) menegaskan bahwa diversifikasi sumber energi dan pasar ekspor merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis global.

Secara keseluruhan, konflik Rusia–Ukraina telah menimbulkan dampak luas dan kompleks terhadap perekonomian Indonesia. Lonjakan harga pangan dan energi menyebabkan inflasi yang signifikan, sementara volatilitas pasar keuangan mencerminkan keterhubungan erat Indonesia dengan ekonomi global. Perdagangan dan investasi menghadapi ketidakpastian, dan ketahanan pangan nasional diuji oleh ketergantungan impor gandum. Namun di tengah tantangan, Indonesia juga menunjukkan kapasitas adaptasi melalui kebijakan stabilisasi harga, diversifikasi pasokan, serta diplomasi ekonomi yang lebih aktif. Dengan demikian, konflik ini bukan hanya memperlihatkan kerentanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang tepat dan responsif.

2.5 Indonesia sebagai Negara *Middle Power*

Indonesia dapat diposisikan sebagai sebuah negara *middle power* dalam sistem internasional, terutama jika dilihat dari karakter politik luar negeri dan pola keterlibatannya dalam permasalahan global. Meskipun tidak memiliki kapasitas militer maupun ekonomi yang setara dengan negara adidaya, Indonesia dapat menunjukkan kemampuan untuk memainkan peran aktif melalui diplomasi, kepemimpinan normatif, dan keterlibatan multilateral. Hal ini tercermin dari konsistensi Indonesia dalam mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang memungkinkan Indonesia terlibat dalam berbagai isu internasional tanpa terikat pada aliansi kekuatan besar tertentu (Andrew F. Cooper 1993).

Sebagai negara *middle power*, Indonesia cenderung menjalankan peran non-hegemonik dengan menekankan dialog, kerja sama, serta pengelolaan kepentingan bersama. Indonesia kerap berperan sebagai pihak yang mendorong komunikasi, membangun kepercayaan, dan menjaga stabilitas dalam hubungan internasional, baik melalui diplomasi bilateral maupun forum multilateral. Pola ini sejalan dengan karakter *middle power* yang berfungsi sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengelolaan isu-isu global, tanpa memiliki kemampuan untuk menentukan hasil akhir secara sepihak.

Dengan demikian, dalam penelitian ini Indonesia dapat dipahami sebagai negara *middle power* yang berupaya memaksimalkan pengaruh diplomatik dan legitimasi internasionalnya untuk merespons konflik dan krisis global. Pemahaman ini menjadi landasan analitis untuk menilai bagaimana peran dan keterbatasan Indonesia dalam merespons konflik Rusia–Ukraina, yang selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci pada Bab Pembahasan.

BAB 3

PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA *MIDDLE POWER* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA–UKRAINA TAHUN 2022–2023

Bab ini membahas secara mendalam langkah-langkah diplomasi yang ditempuh Indonesia dalam merespons konflik Rusia–Ukraina yang meletus pada Februari 2022 dan terus berlanjut hingga 2023. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya memainkan peran sebagai penengah dan penggerak dialog damai, baik di forum bilateral maupun multilateral. Konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Eropa Timur, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap keamanan internasional, perekonomian global, serta ketahanan pangan dan energi dunia. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi diplomasi Indonesia menjadi penting untuk memahami sejauh mana kontribusi negara ini dalam meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian damai.

3.1 Respon Negara-Negara Besar dan Lembaga Internasional

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina sejak 2022 telah menarik perhatian negara-negara besar serta lembaga internasional, terutama karena implikasinya terhadap keamanan global, stabilitas ekonomi internasional, dan prinsip kedaulatan negara. Respon dari berbagai pihak menunjukkan beragam pendekatan: mulai dari sanksi ekonomi, bantuan militer, hingga mediasi diplomatik. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan sekutu NATO secara terang-terangan mendukung Ukraina, sementara lembaga seperti Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa turut berperan dalam upaya diplomatik dan kemanusiaan. Tanggapan global ini membentuk lanskap baru dalam hubungan internasional pasca-Perang Dingin, di mana posisi moral dan kepentingan nasional saling berbenturan.

Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO menjadi aktor utama dalam mendukung Ukraina secara militer maupun ekonomi. Amerika Serikat telah menyalurkan miliaran dolar dalam bentuk senjata, pelatihan militer, dan bantuan kemanusiaan sejak awal invasi. NATO sendiri, meskipun tidak mengerahkan pasukan secara langsung, memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dan menjamin keamanan anggota-anggota perbatasan seperti Polandia dan Lithuania. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai bentuk deterrent terhadap potensi ekspansi agresi Rusia lebih lanjut (Hutabarat, 2022). Dalam KTT NATO tahun 2022 dan 2023, Ukraina mendapatkan komitmen jangka panjang dari aliansi tersebut, meskipun belum memperoleh keanggotaan penuh karena pertimbangan eskalasi konflik lebih lanjut.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menunjukkan sikap tegas dengan mengeluarkan berbagai resolusi yang mengecam invasi Rusia. Pada Maret 2022, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menyerukan penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina, dengan 141 negara menyatakan dukungan terhadap resolusi tersebut. Namun, efektivitas PBB sebagai lembaga penegak perdamaian dikritik karena Dewan Keamanan PBB terhambat oleh hak veto Rusia sebagai anggota tetap, yang menyebabkan banyak upaya resolusi mengutuk agresi Rusia terblokir (Nagy & Beng, 2022). Meskipun demikian, badan-

badan PBB seperti UNHCR dan WFP tetap aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dan korban sipil.

Peran Indonesia dalam konflik Rusia–Ukraina melalui pendekatan sebagai negara *middle power* memperoleh beragam tanggapan dari komunitas internasional. Meskipun Indonesia tidak dipandang sebagai kekuatan utama dalam geopolitik global, keterlibatannya tetap mendapatkan apresiasi karena keberaniannya menjalankan peran kepemimpinan non-hegemonik dalam situasi konflik berskala besar. Pandangan ini tidak terlepas dari konsistensi Indonesia dalam menerapkan politik luar negeri bebas aktif, serta kemampuannya membangun dan menjaga komunikasi dengan kedua pihak yang saling berkonflik tanpa terikat pada aliansi politik maupun kepentingan kekuatan besar tertentu. (The Jakarta Post, 2022).

Dari kalangan negara besar, tanggapan terhadap peran Indonesia cenderung bersifat hati-hati namun positif. Amerika Serikat dan beberapa negara anggota Uni Eropa menghargai kunjungan Presiden Jokowi ke Kyiv sebagai bentuk dukungan terhadap kedaulatan Ukraina, meskipun mereka tetap mengharapkan sikap yang lebih tegas terhadap Rusia (The Jakarta Post, 2022). Rusia, di sisi lain, menyambut baik kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow dan menilai Indonesia sebagai mitra strategis yang memahami pentingnya komunikasi terbuka dalam diplomasi global (The Diplomat, 2022). Cina dan India bahkan memuji pendekatan Indonesia sebagai model diplomasi yang seimbang dan nonkonfrontatif, sesuai dengan prinsip negara-negara Selatan yang mengutamakan dialog dibanding tekanan politik.

Dari sudut pandang aliansi seperti NATO, respons terhadap Indonesia terkesan lebih netral. NATO tidak secara langsung mengomentari peran Indonesia, tetapi menyambut baik semua inisiatif diplomatik yang mendukung penghentian konflik. Meskipun demikian, beberapa analis NATO menilai bahwa pendekatan Indonesia akan lebih efektif bila diikuti dengan kerja sama multilateral yang lebih luas dan koordinasi dengan blok-blok keamanan internasional (NATO Watch, 2022). Di sisi lain, PBB memberikan respons yang relatif positif, terutama karena misi damai dan bantuan kemanusiaan yang dibawa Indonesia sejalan dengan tujuan utama PBB dalam menangani konflik. Sekretaris Jenderal PBB bahkan menyebut peran Indonesia sebagai upaya konstruktif yang menunjukkan pentingnya keterlibatan negara-negara nonblok dalam diplomasi internasional (UN News, 2022).

Persepsi masyarakat internasional secara luas juga mencerminkan rasa hormat terhadap posisi Indonesia sebagai negara yang berani mengambil langkah aktif, meskipun memiliki keterbatasan dalam aspek militer dan ekonomi. Banyak pengamat memuji langkah Indonesia sebagai contoh diplomasi moral dan simbolik yang mampu mengisi kekosongan dalam hubungan internasional yang semakin terpolarisasi (Yusuf, 2022). Meskipun hasil konkret dari upaya ini belum signifikan secara strategis, persepsi global terhadap Indonesia mengalami penguatan dalam hal reputasi, kapasitas diplomatik, dan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Secara keseluruhan, persepsi dunia internasional terhadap peran Indonesia dalam konflik Rusia–Ukraina bersifat positif namun realistis. Indonesia dianggap telah memainkan peran sesuai kapasitasnya, dan keberadaannya sebagai penengah

yang netral menjadi aset penting dalam percaturan diplomasi global. Pengakuan ini mempertegas relevansi pendekatan bebas aktif Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan internasional dan memperluas ruang kontribusi Indonesia dalam isu-isu global lainnya (Yusuf, 2022).

3.2 Indonesia sebagai Negara *Middle Power* dan Implementasinya dalam Konflik Rusia-Ukraina

Dalam konteks hubungan internasional dan penyelesaian konflik, teori *middle power* menjadi pendekatan penting untuk memahami peran negara-negara yang bukan merupakan negara adidaya dalam merespons konflik berskala besar. Pendekatan ini menekankan bahwa negara yang tidak memiliki dominasi militer atau ekonomi tetap dapat memainkan peran aktif melalui kepemimpinan yang tidak didasarkan pada dominasi kekuatan, diplomasi, dan keterlibatan multilateral. Dalam situasi konflik internasional yang melibatkan kekuatan besar, negara *middle power* sering kali mengambil peran sebagai aktor penyeimbang yang berupaya menjaga stabilitas, membuka ruang komunikasi, serta mendorong penyelesaian konflik tanpa menggunakan tekanan koersif.

Teori *middle power* relevan untuk menjelaskan keterlibatan negara seperti Indonesia karena memungkinkan negara non-adidaya menjalankan peran aktif tanpa terikat pada aliansi militer maupun kepentingan geopolitik kekuatan besar tertentu. Dalam kerangka ini, Indonesia dipahami sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif melalui peran katalisator, fasilitator, dan pengelola

proses diplomatik. Pendekatan tersebut memungkinkan Indonesia untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik, menjaga legitimasi internasional, serta berkontribusi dalam upaya stabilisasi konflik meskipun tidak memiliki kapasitas untuk menentukan hasil akhir secara langsung. Oleh karena itu, penerapan teori *middle power* memberikan landasan analitis yang tepat untuk memahami strategi dan keterbatasan peran Indonesia dalam konflik Rusia–Ukraina pada Bab Pembahasan ini.

3.2.1 *Peran Indonesia sebagai Katalisator (Catalyst) melalui Kunjungan ke Rusia dan Ukraina*

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina pada Juni 2022 mencerminkan peran Indonesia sebagai katalisator dalam kerangka teori *middle power*. Peran ini ditunjukkan melalui inisiatif Indonesia dalam membuka kembali ruang komunikasi diplomatik di tengah kebuntuan dialog antara kedua negara yang berkonflik. Keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin sejak April 2022, serta melanjutkannya dengan kunjungan langsung ke Kyiv dan Moskow, menunjukkan upaya Indonesia untuk memicu kembali perhatian internasional terhadap pentingnya penyelesaian damai konflik Rusia–Ukraina.

Sebagai negara yang tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan solusi, Indonesia menjalankan fungsi katalisator dengan mendorong agenda perdamaian

dan mengangkat isu kemanusiaan serta stabilitas global ke dalam diskursus internasional. Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 turut memperkuat peran tersebut, karena kunjungan ini tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas global yang terdampak oleh konflik. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai pemicu proses diplomatik awal tanpa bertujuan menentukan hasil akhir konflik. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2022).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk bertemu langsung dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan bahwa meskipun situasi global masih sangat kompleks dan penuh tantangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak diam dan berusaha memberikan kontribusi bagi penyelesaian krisis yang tengah terjadi. Indonesia, sebagai Presidensi G20 dan anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, merasa memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya meredakan ketegangan internasional ini (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Kunjungan Presiden Jokowi ke kedua negara tersebut bukan hanya sekadar upaya untuk menyampaikan solidaritas Indonesia terhadap isu kemanusiaan, tetapi juga untuk mendorong perdamaian global melalui diplomasi yang aktif dan konstruktif. Presiden Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia setelah konflik dimulai, sebuah langkah yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai perdamaian dan kestabilan dunia. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memberi kontribusi dalam mengatasi

krisis pangan yang diakibatkan oleh perang, yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Ukraina dan Rusia, tetapi juga oleh negara-negara lain, terutama negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari kedua negara tersebut (Fithriya et al., 2022).

Sebelumnya, pada 29 April 2022, Presiden Joko Widodo mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Dalam percakapan dengan Zelensky, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memberikan bantuan senjata, mengingat konstitusi Indonesia yang melarang keterlibatan dalam konflik militer. Meskipun demikian, Presiden Jokowi menawarkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina yang terdampak oleh perang. Selain itu, Jokowi juga mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diadakan di Bali pada November 2022. Dalam percakapan dengan Presiden Putin, Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog dan menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk berperan dalam proses tersebut (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurut Hikmahanto, inisiatif Presiden Jokowi untuk mengunjungi kedua negara tersebut patut diapresiasi karena perang di Ukraina telah menyebabkan penderitaan yang luas, termasuk bagi negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik ini. Selain itu, kunjungan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, dengan mengikuti prinsip politik

luar negeri bebas dan aktif. Indonesia, dengan tidak berpihak pada salah satu pihak, memilih untuk mendukung perdamaian dunia dan mengakhiri tragedi kemanusiaan yang terjadi (Fithriya et al., 2022). Rencana kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mengeksplorasi potensi kesepakatan antara Rusia dan Ukraina yang dapat mengarah pada gencatan senjata. Presiden Jokowi berharap bahwa kunjungannya dapat membawa semangat perdamaian dari Jakarta dan membantu meredakan ketegangan antara Moskow dan Kiev.

Pertemuan Empat Mata Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, pada 29 Juni 2022, merupakan wujud nyata komitmen Indonesia terhadap upaya perdamaian dunia dan solidaritas internasional. Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai respons terhadap dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kehadirannya di Ukraina adalah bentuk kepedulian mendalam Indonesia terhadap penderitaan yang dihadapi rakyat Ukraina. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengungkapkan kesediaannya untuk bertindak sebagai mediator antara Ukraina dan Rusia, khususnya dengan menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Vladimir Putin. Harapan utamanya adalah untuk mendorong dialog dan upaya penyelesaian damai atas konflik yang tengah berlangsung antara kedua negara tersebut (Komara 2022).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, yang merupakan dasar utama dalam hukum internasional (Komara 2022). Ia juga menyampaikan

keprihatinan yang mendalam terkait dampak perang terhadap kondisi kemanusiaan di Ukraina, serta menyatakan kesediaan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Salah satu bentuk bantuan yang disiapkan adalah pengiriman obat-obatan serta dukungan untuk rekonstruksi rumah sakit yang rusak di sekitar wilayah Kyiv. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Ukraina memiliki peran vital dalam memastikan kelancaran rantai pasok pangan dunia, mengingat negara tersebut adalah salah satu penghasil gandum terbesar. Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh pihak untuk memastikan keamanan ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui jalur pelabuhan laut yang aman dan terbuka.

Pertemuan tersebut juga menjadi momen di mana Presiden Zelensky menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Presiden Jokowi, yang menjadi pemimpin negara Asia pertama yang mengunjungi Kyiv sejak perang dimulai. Zelensky juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Indonesia dan rakyat Indonesia atas dukungan yang diberikan terhadap perjuangan Ukraina dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Kedua pemimpin sepakat untuk terus memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Ukraina, dengan fokus pada bidang rekonstruksi pascaperang. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah peluncuran rezim bebas visa antara kedua negara, yang diharapkan dapat mempererat hubungan diplomatik dan mempermudah akses bagi warga kedua negara (Komara 2022).

Kunjungan ini mencerminkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional dan menunjukkan komitmen negara ini terhadap upaya penyelesaian damai terhadap konflik global. Hal ini sekaligus menunjukkan penerapan politik

luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kerja sama internasional dalam menghadapi krisis internasional.

3.2.2 *Peran Indonesia sebagai Fasilitator (Facilitator) dalam Mendorong Dialog untuk Misi Kemanusiaan*

Dalam kerangka teori *middle power*, pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky mencerminkan peran Indonesia sebagai *facilitator*, yaitu negara yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi, pendorong dialog, dan penjaga keterbukaan proses diplomatik tanpa menggunakan tekanan koersif. Peran tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang menekankan isu kemanusiaan, penghormatan terhadap norma internasional, serta kesediaan Indonesia untuk membantu membangun komunikasi di tengah konflik bersenjata. Adapun poin-poin penting dalam pertemuan empat mata Jokowi dan Zelensky yakni pertama, Jokowi menegaskan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman obat-obatan serta rencana untuk membantu dalam rekonstruksi fasilitas kesehatan yang rusak akibat perang. Hal ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk meringankan penderitaan rakyat Ukraina dan mendukung pemulihan pascakonflik (Komara 2022).

Kedua, dukungan terhadap kedaulatan Ukraina. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan dukungannya yang tidak terbagi terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Indonesia secara tegas menolak segala bentuk agresi terhadap negara berdaulat dan menekankan bahwa prinsip kedaulatan adalah hal yang tidak dapat ditawar dalam hukum internasional. Poin ini mencerminkan

posisi konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dan menentang setiap bentuk pelanggaran terhadap norma internasional, termasuk agresi militer (Komara 2022).

Ketiga, mendorong dialog untuk perdamaian. Presiden Jokowi juga menyampaikan niatnya untuk berperan sebagai jembatan komunikasi antara Ukraina dan Rusia. Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia bersedia untuk menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, dengan tujuan untuk mendorong kedua pihak menuju meja perundingan dan menciptakan peluang bagi tercapainya gencatan senjata. Langkah ini menggambarkan upaya Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam diplomasi internasional dengan mendorong dialog sebagai jalan menuju penyelesaian damai atas konflik yang tengah berlangsung (Komara 2022).

Keempat, menjamin keamanan ekspor pangan Ukraina. Dalam pembahasan dengan Presiden Zelensky, Presiden Jokowi juga menekankan peran penting Ukraina dalam rantai pasok pangan dunia, khususnya terkait ekspor gandum yang sangat vital bagi kebutuhan pangan global. Indonesia mendorong adanya upaya untuk memastikan bahwa jalur ekspor pangan dari Ukraina tetap terjaga, meskipun di tengah kondisi konflik. Poin ini menyoroti dampak luas dari perang terhadap ketahanan pangan dunia, yang dirasakan juga oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada pasokan pangan tersebut.

Kelima, membangun kerja sama bilateral yang lebih kuat. Terakhir, Presiden Zelensky mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Indonesia dalam perjuangan Ukraina. Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerja sama

bilateral, terutama dalam bidang rekonstruksi pascaperang dan mempererat hubungan diplomatik antara kedua negara. Salah satu langkah yang disepakati adalah peluncuran rezim bebas visa antara Indonesia dan Ukraina, yang diharapkan akan mempermudah hubungan kedua negara di masa mendatang, sekaligus memperkuat ikatan antara rakyat kedua negara (Komara 2022).

3.2.3 *Peran Indonesia sebagai Pengelola (Manager) dalam Menjaga Stabilitas Global*

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin pada 30 Juni 2022 mencerminkan peran Indonesia sebagai *manager*, yaitu negara yang berupaya mengelola dampak konflik dan menjaga stabilitas sistem internasional melalui diplomasi, koordinasi, dan mekanisme multilateral. Peran ini diwujudkan melalui upaya Indonesia mendorong dialog, mengelola konsekuensi konflik terhadap ketahanan pangan global, serta menjaga kerja sama internasional agar konflik tidak meluas dan mengganggu stabilitas global. Pertemuan ini menunjukkan bagaimana Indonesia menjalankan fungsi pengelolaan konflik dengan menekankan stabilitas, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan keberlanjutan kerja sama global (CNN INDONESIA 2022).

Pertama, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penghentian konflik dan mendorong dialog antara Ukraina dan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan komunikasi antara kedua negara, dengan harapan dapat membuka ruang bagi perundingan dan mencapai penyelesaian damai (CNN INDONESIA 2022). Presiden Putin

menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan Rusia untuk berkomunikasi lebih lanjut.

Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan keprihatinan atas dampak perang terhadap ketahanan pangan global. Ia menekankan bahwa blokade ekspor pangan dan pupuk dari Ukraina dapat memperburuk krisis pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Presiden Putin menjamin bahwa Rusia akan memastikan keamanan ekspor pangan dan pupuk, serta berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang konstruktif (CNN INDONESIA 2022).

Ketiga, kedua pemimpin membahas pentingnya memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Rusia. Presiden Putin mengingatkan bahwa Rusia telah banyak membantu Indonesia di awal kemerdekaan, dan kini saatnya untuk mempererat hubungan kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, energi, dan teknologi. Presiden Jokowi menyambut baik ajakan tersebut dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan (CNN INDONESIA 2022).

Keempat, Presiden Jokowi mengajak Presiden Putin untuk mendukung penyelesaian konflik melalui mekanisme internasional. Ia menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip PBB dalam menyelesaikan sengketa antarnegara. Presiden Putin menyatakan bahwa Rusia siap bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lain untuk mencapai solusi yang adil dan damai (CNN INDONESIA 2022).

Kelima, kedua pemimpin sepakat untuk terus berkomunikasi dan berkonsultasi secara rutin mengenai perkembangan situasi di Ukraina dan upaya

perdamaian yang sedang dilakukan. Mereka juga sepakat untuk memperkuat dialog multilateral melalui forum-forum internasional, termasuk G20, untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan global yang dihadapi (CNN INDONESIA 2022).

3.2.4 Hasil Akhir dari Upaya Middle Power Indonesia

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia pada Juni 2022 merupakan langkah strategis Indonesia dalam merespons dampak kemanusiaan dan krisis global yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Meskipun sering disebut sebagai misi perdamaian, kunjungan ini memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup aspek politik, ekonomi, dan diplomasi internasional. Indonesia memanfaatkan diplomasi sebagai alat soft power untuk memperkuat citra internasionalnya. Melalui kunjungan ini, Indonesia menunjukkan peran aktif dalam menyuarakan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan, sekaligus memperkuat posisi sebagai negara yang berkomitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia (Tiara & Mas'udi, 2023).

Kunjungan ke Ukraina juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi Indonesia, terutama dalam memastikan kelancaran pasokan pangan. Ukraina merupakan salah satu pemasok utama gandum ke Indonesia, dan gangguan terhadap ekspor pangan dari negara tersebut dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Dengan berperan sebagai mediator, Indonesia berupaya memastikan keamanan jalur ekspor pangan dan pupuk, serta mengurangi dampak krisis pangan global. Dalam menghadapi tekanan internasional, Indonesia

mempertahankan posisi netral dan berusaha menjadi jembatan komunikasi antara Ukraina dan Rusia. Presiden Jokowi menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan dalam proses dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini mencerminkan strategi diplomasi multilateral Indonesia yang mengedepankan dialog dan kerja sama internasional (Tiara & Mas'udi, 2023).

Kunjungan ke Rusia juga dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Presiden Jokowi dan Presiden Putin membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama di bidang energi, perdagangan, dan teknologi. Dengan mempererat hubungan dengan Rusia, Indonesia berharap dapat memperluas pengaruhnya di kawasan dan meningkatkan posisi tawar dalam forum-forum internasional. Meskipun langkah diplomatik Indonesia diapresiasi oleh beberapa pihak, terdapat juga kritik terhadap efektivitas peran Indonesia sebagai mediator. Beberapa pengamat menilai bahwa Indonesia tidak memiliki leverage yang cukup untuk mempengaruhi kedua belah pihak dalam konflik tersebut. Namun, pendekatan Indonesia yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kerja sama internasional tetap dianggap sebagai kontribusi positif dalam upaya penyelesaian konflik global (Wicaksana et al., 2022).

Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan resmi untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah perbatasan Rusia-Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Rolliansyah 'Roy' Soemirat, pada 27 Maret 2025. Ia menekankan bahwa Indonesia terus memantau perkembangan situasi di

Ukraina dan mendukung penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi yang inklusif. Meskipun demikian, wacana pembentukan pasukan penjaga perdamaian multinasional pasca-gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina mulai berkembang. Beberapa negara Barat yang menjadi sekutu Ukraina dikabarkan tengah mempertimbangkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan sebagai bagian dari upaya memastikan stabilitas dan mencegah eskalasi konflik. Usulan ini mencakup kemungkinan keterlibatan negara-negara netral seperti Indonesia, India, Brasil, dan Arab Saudi, yang dianggap memiliki posisi seimbang dalam diplomasi global dan tidak terikat pada blok militer tertentu (Dermawan 2025).

Namun, Rusia menolak gagasan pengiriman pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO ke Ukraina, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat memperburuk hubungan dengan Rusia dan menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali. Sebagai gantinya, Rusia mengusulkan agar pasukan penjaga perdamaian PBB berasal dari negara-negara netral seperti India, Brasil, Arab Saudi, dan Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yang menjadi pertimbangan utama dalam merespons isu ini. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi yang inklusif. Indonesia juga telah berulang kali menekankan pentingnya solusi damai dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB, G20, dan ASEAN (Dermawan 2025).

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengirim pasukan penjaga

perdamaian di bawah bendera United Nations Peacekeeping Forces (UNPKF), seperti dalam misi di Kongo, Lebanon, dan Sudan. Namun, keterlibatan dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti Rusia dan NATO akan membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan kedua pihak. Meskipun demikian, Indonesia tetap membuka kemungkinan untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian, baik melalui jalur diplomasi maupun misi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia juga akan terus memantau perkembangan situasi di Ukraina dan memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap selaras dengan prinsip-prinsip perdamaian dan kepentingan nasional.

3.3 *Timeline Peranan Indonesia sebagai Middle Power*

Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam konflik Rusia–Ukraina menjadi salah satu tonggak penting dalam peran negara tersebut di kancah politik internasional. Melalui strategi *Middle Power*, Presiden Joko Widodo berusaha menjadi jembatan komunikasi antara dua negara yang sedang berkonflik. Langkah ini menunjukkan keberanian Indonesia dalam mengedepankan diplomasi damai dan memperkuat prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia.

Kunjungan langsung Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow pada Juni 2022 bukan sekadar simbol solidaritas kemanusiaan, tetapi juga manifestasi dari peran Indonesia dalam memperjuangkan stabilitas global. Melalui serangkaian pertemuan bilateral dan komunikasi diplomatik intensif, Indonesia mencoba

membuka ruang dialog untuk mengakhiri konflik bersenjata serta memastikan kelancaran rantai pasok pangan dunia yang terganggu akibat perang tersebut.

Lebih lanjut, tindak lanjut dari misi diplomasi ini terus bergulir hingga tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Indonesia konsisten menegaskan posisi netral dan mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomatik, bahkan hingga muncul wacana keterlibatan negara netral, termasuk Indonesia, dalam pasukan penjaga perdamaian di wilayah perbatasan Rusia–Ukraina pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan keberlanjutan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan diplomasi global yang konstruktif.

Tabel *Timeline* Peranan Indonesia sebagai Negara *Middle Power*

Waktu	Peristiwa Utama	Keterangan / Detail Penting
27 April 2022	Awal komunikasi diplomatik	Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Komunikasi ini menjadi dasar bagi keputusan Indonesia untuk berperan sebagai mediator konflik Rusia–Ukraina.
29 April 2022	Pembicaraan resmi via telepon	Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan memberikan bantuan senjata, melainkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina. Ia juga mengundang Zelensky ke KTT G20 Bali 2022 dan menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog kepada Putin.
26 Juni 2022	Persiapan dan pelaksanaan kunjungan luar negeri	Presiden Jokowi melaksanakan lawatan ke Eropa Timur, yang mencakup kunjungan langsung ke Kyiv (Ukraina) dan Moskow (Rusia) sebagai bagian dari misi perdamaian dan solidaritas kemanusiaan.
29 Juni 2022	Pertemuan empat mata dengan Zelensky di Kyiv	Pertemuan empat mata dengan Presiden Zelensky di Istana Maryinsky. Jokowi membawa pesan perdamaian dan menawarkan bantuan kemanusiaan (obat-obatan, rekonstruksi RS). Indonesia

		menekankan dukungan terhadap kedaulatan Ukraina dan pentingnya ekspor pangan global. Zelensky memberi apresiasi dan menyetujui kerja sama bilateral termasuk rencana bebas visa.
30 Juni 2022	Kunjungan ke Moskow, Rusia	Pertemuan dengan Presiden Putin di Kremlin. Jokowi menegaskan pentingnya penghentian konflik dan dialog. Putin menyambut baik, berjanji menjaga ekspor pangan dan pupuk. Keduanya bahas kerja sama bilateral di bidang ekonomi, energi, dan teknologi.
Juli 2023	Tindak lanjut diplomasi	Upaya diplomasi menurun dikarenakan tidak mendapatkan dukungan dari pihak-pihak langsung di konflik, sehingga tidak menghasilkan perjanjian damai atau gencatan senjata.

Sumber: Data diambil dan diolah oleh penulis dari beberapa sumber.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perang Rusia dan Ukraina yang memuncak pada tahun 2022 menjadi pemicu utama munculnya dinamika geopolitik dan kemanusiaan yang meluas ke berbagai kawasan dunia, termasuk Asia Tenggara. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk menempatkan diri sebagai negara yang berupaya menjaga stabilitas internasional melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia tidak hanya didasari oleh komitmen terhadap perdamaian dunia, tetapi juga oleh kebutuhan untuk merespons dampak global yang muncul akibat perang tersebut.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa periode 2022-2023 merupakan fase paling intensif dari aktivitas diplomatik Indonesia. Komunikasi bilateral, penegasan sikap di forum internasional, hingga inisiatif kunjungan langsung ke negara-negara yang berkonflik memperlihatkan bahwa Indonesia berusaha menyeimbangkan kepentingan nasional dengan peran globalnya. Teori *middle power* ini menjadi landasan analitis untuk memahami bagaimana Indonesia berupaya menjembatani dua pihak yang tidak bersedia berunding langsung.

Dampak perang terhadap perekonomian Indonesia tampak signifikan, terutama pada sektor pangan dan energi yang sangat bergantung pada impor dari Rusia dan Ukraina. Gangguan pasokan menyebabkan lonjakan harga gandum, pupuk, dan minyak, yang memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Situasi ini memperlihatkan kerentanan struktur ekonomi Indonesia terhadap

guncangan eksternal yang muncul tiba-tiba dan berskala besar.

Walaupun demikian, terdapat pula peluang jangka pendek berupa kenaikan pendapatan ekspor dari komoditas seperti batu bara dan minyak sawit akibat tingginya harga global. Namun kondisi tersebut tidak bersifat stabil karena fluktuasi pasar internasional tetap tinggi sepanjang perang berlangsung. Keseluruhan temuan menunjukkan perlunya diversifikasi pasokan, strategi mitigasi risiko, serta penguatan ketahanan ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian global.

Upaya Indonesia dalam menjalankan peranannya sebagai *middle power* terlihat jelas melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow untuk membuka ruang komunikasi, menyampaikan pesan damai, dan menunjukkan kepedulian terhadap dampak kemanusiaan. Indonesia juga memanfaatkan forum multilateral untuk mengangkat isu stabilitas global dan keamanan pangan, yang menunjukkan posisi negara sebagai aktor netral yang berusaha mendorong dialog tanpa keberpihakan.

Penelitian juga menegaskan bahwa meskipun langkah diplomasi ini belum menghasilkan gencatan senjata atau kesepakatan konkret, Indonesia tetap memperoleh pengakuan sebagai negara yang konsisten mendukung perdamaian dunia. Upaya tersebut menghadapi berbagai keterbatasan seperti tekanan geopolitik, ketidaksiapan kedua pihak untuk berunding, serta terbatasnya daya pengaruh Indonesia dalam konflik antar kekuatan besar. Namun secara keseluruhan, tindakan diplomatik Indonesia memperkuat relevansi prinsip bebas aktif di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian mengenai PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA *MIDDLE POWER* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA – UKRAINA TAHUN 2022-2023, ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan tindak lanjut. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada akses terhadap sumber yang membahas upaya diplomatik Indonesia, sehingga pada akhirnya penelitian hanya bergantung pada jurnal atau publikasi dalam bentuk sekunder seperti laporan pemerintah, berita local maupun internasional serta juga dari kajian-kajian akademik.

Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggali data yang lebih dalam lagi dengan melakukan wawancara langsung terhadap diplomat ataupun para pejabat Kementerian Luar Negeri atau bahkan dengan para aktor yang memiliki akses langsung mengenai upaya yang dilakukan. Selain itu juga penelitian ini hanya memiliki rentang waktu dari tahun 2022 hingga 2023, namun disisi lain konflik saat ini masih berlangsung dan mungkin kedepannya konflik ini masih dapat mempengaruhi posisi Indonesia. Mungkin pada penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan melakukan riset mengenai perkembangan konflik setelah tahun 2023 baik dalam sisi kebijakan Indonesia ataupun dampak terhadap geopolitik.

Penelitian ini juga belum melakukan pembahasan secara meluas dari sudut pandang negara lain yang terdampak atau juga melakukan upaya penyelesaian konflik, karena dalam penelitian ini hanya berfokus pada Indonesia dan peranannya

sebagai negara *middle power* saja. Penelitian ini juga belum menggunakan metode kuantitatif untuk membahas perubahan harga komoditas, inflasi, atau ketidakstabilan yang disebabkan oleh konflik. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk dapat menyajikan data secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrew F. Cooper, Richard A. Higgott, Kim Richard Nossal. 1993. *Relocating Middle Powers*. Australia: Melbourne University Press.

Jurnal

- Bakrie, C. R., Delanova, M. O., & Mochamad Yani, Y. (2022). PENGARUH PERANG RUSIA DAN UKRAINA TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA. *Jurnal Caraka Prabu*, 6(1), 65–86. <https://doi.org/10.36859/jcp.v6i1.1019>
- Fithriya, Permata, Napsiah, & Hikmalisa. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine Conflict on Indonesian Political Economy. In *Proceedings of the Annual International Conference on Social Science and Humanities (AICOSH 2022)* (pp. 28–38). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-87-9_5
- Handayani, H. (2022). The impact of the Russian–Ukraine conflict on macroeconomics in Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 473
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>
- Jia, N., Xia, Z., Li, Y., Yu, X., Wu, X., Li, Y., Su, R., Wang, M., Chen, R., & Liu, J. (2024). The Russia-Ukraine war reduced food production and exports with a disparate geographical impact worldwide. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 765. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01915-5>
- Junaedi, J. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine War on the Indonesian Economy. *Journal of Social Commerce*, 2(2), 71–81. <https://doi.org/10.56209/jommerce.v2i2.29>
- Komala, M., Setiawan, A., Zaman, A. N., & Tohari, A. (2023). Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia dan Ukraina Tahun 2022. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(2), 97–112. <https://doi.org/10.24853/independen.4.2.97-112>
- Midhol, A. B. (2022). *KONFLIK RUSIA-UKRAINA DAN PERAN PEMERINTAH INDONESIA*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sdkpz>
- Parulian Banurea, P., Aini, R., & Manurung, H. (2023). *DAMPAK PERANG RUSIA-UKRAINA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA: ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN DAN PERUBAHAN POLA PERDAGANGAN*. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/indec.php/jbsuta>
- Saeri, M., Jamaan, A., Surez, M. F., Gayatri, P., Utami, H. I., & Zarina. (2016). Dinamika global : jurnal ilmu hubungan internasional. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2).
- Sari, E. L., Ismail, T., & Geraldina, I. (2023). Comparative Analysis of Stock Prices, Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, and Trading Volume Activity in the Indonesia Stock Exchange: An Event Study of the Russia-Ukraine War. *European Journal of Business and Management Research*, 8(5),

- 187–197. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.5.2159>
- Sanoyo, A. M., Hidayat, A. M., & Firmialy, S. D. (2024). IMPACT OF THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT ON INDONESIAN COMMODITY STOCKS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *JOURNAL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)*, 3(4), 1036–1049. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v3i4.1307>
- Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 386–397. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529>
- Syuryansyah, S., & Berthanila, R. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 7(1), 97. <https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.96-104>
- Tiara, D. T., & Mas'udi, S. Y. F. (2023). Journal of political issues. *Journal of Political Issues*, 4(2), 74–88.
- Wicaksana, K. S., Ramadhan, R. F., Sujaka, M. 'Azza, & Prasajo, A. S. A. ayubi. (2022). The Effect of the Russia-Ukraine Crisis on Price Fluctuations and Trade in Energy Sector in Indonesia. *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom*, 4(1), 6–18. <https://doi.org/10.37525/mz/2022-1/345>
- Widoretno, A. A., & Fitriyah, N. N. A. (2024). EVENT STUDY: THE IMPACT OF THE RUSSIA-UKRAINE INVASION ON STOCK PRICES AND ABNORMAL RETURNS. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17(1), 39. <https://doi.org/10.30813/jab.v17i1.4584>

Website

- Antara News. (2022, September 7). Russia-Ukraine conflict may continue for a long time: Jokowi. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/248429/russia-ukraine-conflict-may-continue-for-a-long-time-jokowi>
- AP News. (2022, June 29). Why Indonesia's leader is visiting Kyiv, Moscow. AP News. <https://apnews.com/article/g-7-summit-russia-ukraine-putin-zelenskyy-kyiv-4dac309a424d3392224962ce14d35a99>
- Ben Hassen, T., & El Bilali, H. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems? *Foods*, 11(15), 2301. <https://doi.org/10.3390/foods11152301>
- Fadel, M. (2022, June 28). Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina. MPR RI. <https://www.mpr.go.id/berita/Menelisik-Peluang-Keberhasilan-Jokowi-Mendamaikan-Rusia-dan-Ukraina>.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2022). *Presiden Jokowi akan mengunjungi Ukraina dan Rusia*.
- Kompas.com. (2022, July 1). Diplomasi Jokowi di Ukraina dan Rusia: Bukan sekadar misi perdamaian. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/01/05450001/diplomasi-jokowi-di-ukraina-dan-rusia-bukan-sekadar-misi-perdamaian?page=all>
- Kremlin.ru. (2022, June 30). Press statements following Russian-Indonesian talks. The Kremlin. <https://en.kremlin.ru/events/president/news/68789>

- RMOL.id. (2025, March 30). Diplomasi Indonesia dan konflik Ukraina-Rusia. RMOL.id. <https://rmol.id/publika/read/2025/03/30/661556/diplomasi-indonesia-dan-konflik-ukraina-rusia>
- Lazuardi, A. (2023, July 3). *Pupuk Indonesia siapkan opsi bahan baku selain dari Rusia-Ukraina*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3616659/pupuk-indonesia-siapkan-opsi-bahan-baku-selain-dari-rusia-ukraina>.
- Lutsevych, Orysia, & Wallace, J. (2022). *Ukraine-Russia relations*. Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/2021/11/ukraine-russia-relations>.
- Maesaroh. (2022, June 3). *Ini Bukti Nyata Indonesia Jadi “Tumbal” Perang Rusia-Ukraina*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220603140525-4-344146/ini-bukti-nyata-indonesia-jadi-tumbal-perang-rusia-ukraina>.
- Michael, R. (2024). *Ukraine crisis of 2013-14 | Euromaidan, Annexation of Crimea, & War in the Donbas*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Ukraine-crisis>.
- Nagy, S., & Beng, P. K. (2022). *Issue Brief Ukraine-Russia War: A prelude to a post-Western international order?*
- Reuters. (2022, June 30). Indonesian president offers to take message from Ukraine's leader to Putin. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-president-visits-ukraine-peace-mission-2022-06-29/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022a). *Presiden Jokowi bahas solusi damai perang Rusia-Ukraina dengan sejumlah pemimpin negara*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022b). *Presiden Jokowi Kunjungan Ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia Untuk Ukraina | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/presiden-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina>.
- Simanjuntak, T. M., & Dermawan, D. (2025). Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina terhadap Perekonomian di Negara Indonesia. *JIMS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 1–8.
- Stebelsky, I. (1999). *Ukraine - Culture, History, Politics*. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Ukraine/Independent-Ukraine>.
- Wijayanti, I. (2022, August 30). *Dosen Hubungan Internasional Dalam Diskusi Publik Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Presidensi G20 di Indonesia | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia*. FISIP UI. <https://fisip.ui.ac.id/dosen-hubungan-internasional-dalam-diskusi-publik-dampak-konflik-rusia-ukraina-terhadap-presidensi-g20-di-indonesia>